

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi Banten seluas 9.662,92 km² dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah:

- a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

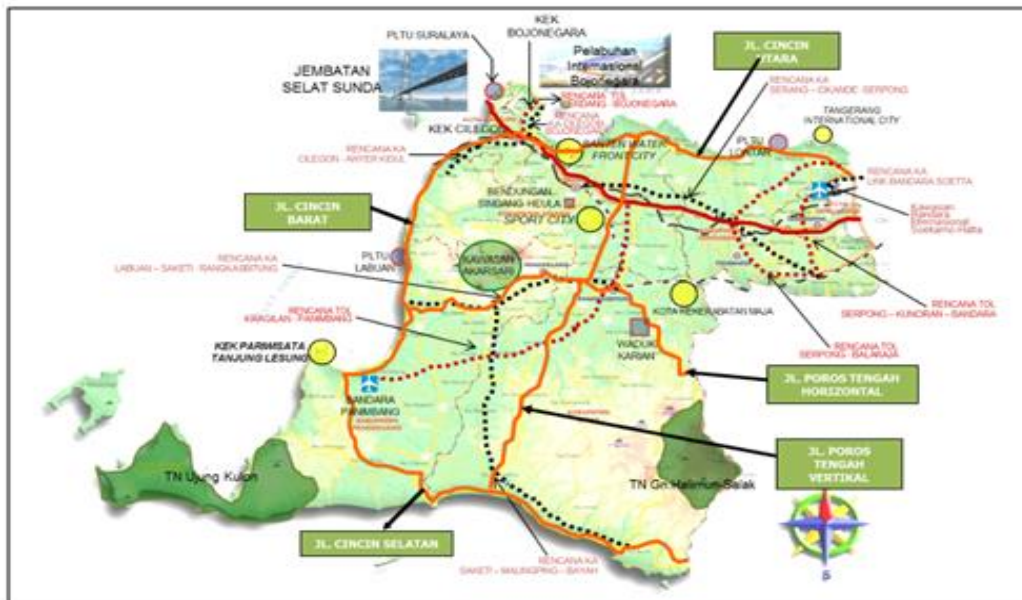
Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan).

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,7°C-32,9°C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 79%-87%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 3.573 mm.

2. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) antara lain, KSN Selat Sunda, KSN Ujung Kulon, KSN JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan : Baja, Petrokimia, Alas kaki, Elektronik, Semen dan Makanan, yang didukung oleh keberadaan beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta–Merak, Jalan Tol Serpong–Jakarta–Purbaleunyi, Kereta Api Jakarta–Merak. Terdapat 39 Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1
Peta Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Banten

3. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang teridentifikasi, antara lain:

a. Wilayah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol;
- 2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocokjaya, Serang, dan Walantaka;
- 3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batusceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
- 4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren;
- 5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
- 6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran, Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita;
- 7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka.

b. Wilayah Rawan Longsor

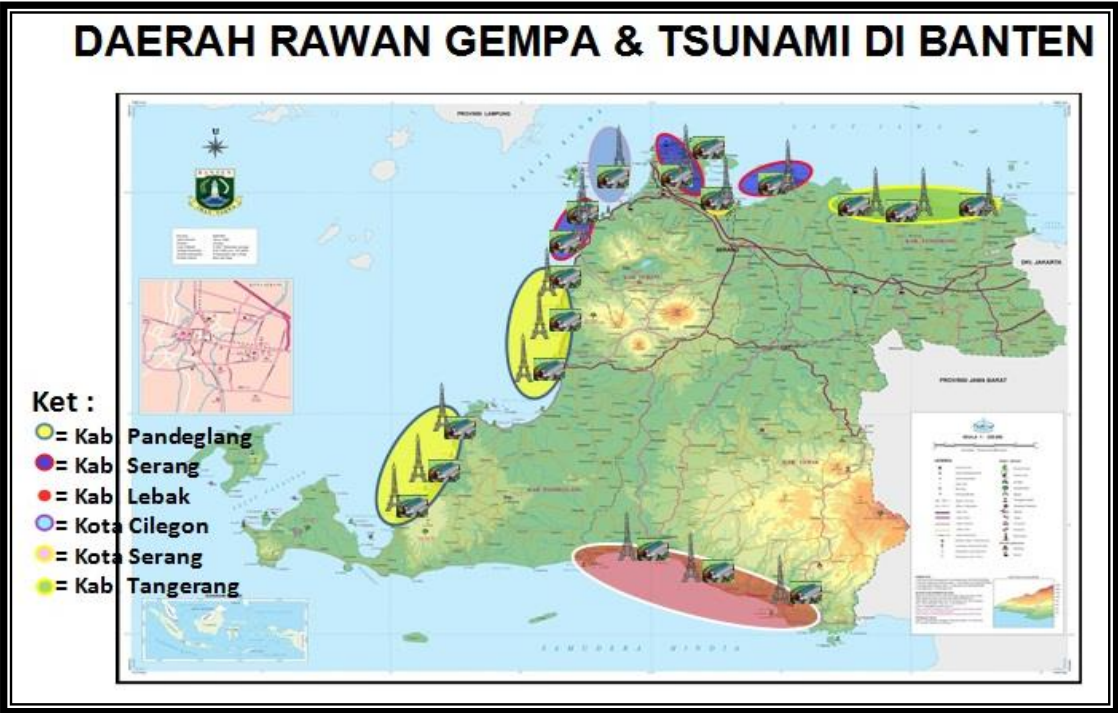
Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
- 2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
- 3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah;
- 4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi.

c. Tsunami

Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2
Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten

4. Demografi

Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Penduduk Banten tahun 2017 mencapai 12.448.160 jiwa, Banten menduduki Peringkat ke-5 Nasional, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.01 persen menurun sebesar 0.06% bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 2.07%, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten, 2015 – 2017 (Jiwa)

KAB/KOTA	2015	2016	2017
1. Kab. Pandeglang	1,194,911	1,200,512	1,205,203
2. Kab. Lebak	1,269,812	1,279,412	1,288,103
3. Kab. Tangerang	3,370,594	3,477,495	3,584,770
4. Kab. Serang	1,474,301	1,484,502	1,493,591
5. Kota Tangerang	2,047,105	2,093,706	2,139,891

KAB/KOTA	2015	2016	2017
6. Kota Cilegon	412,106	418,705	425,103
7. Kota Serang	643,205	655,004	666,600
8. Kota Tangsel	1,543,209	1,593,812	1,644,899
Provinsi Banten	11,955,243	12,203,148	12,448,160

Sumber: SIPD Provinsi Banten Tahun 2018

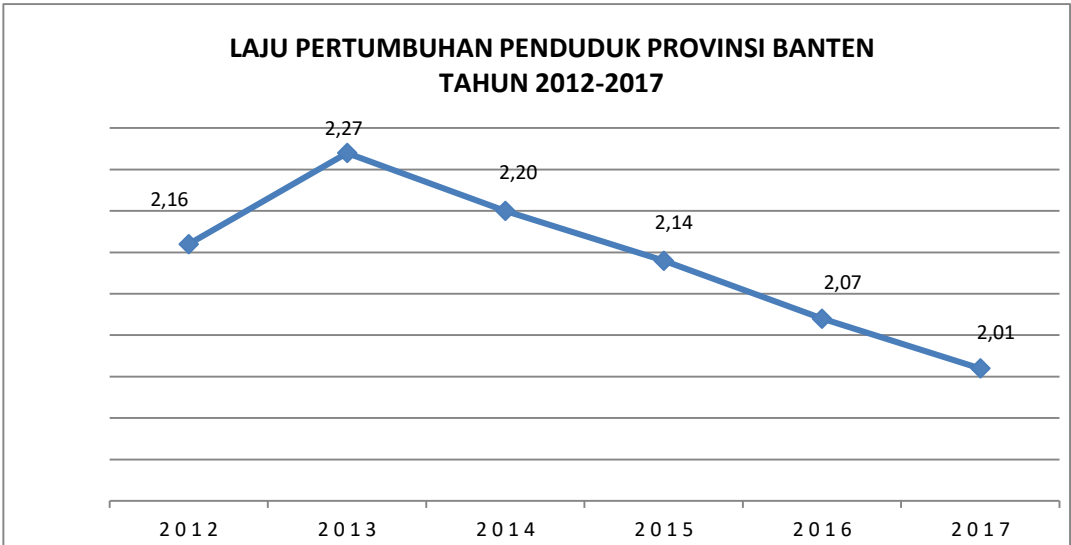
Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Tahun 2015-2017 (Persen)

KAB/KOTA	2015	2016	2017
1. Kab. Pandeglang	0.55	0.47	0.39
2. Kab. Lebak	0.83	0.76	0.68
3. Kab. Tangerang	3.24	3.17	3.08
4. Kab. Serang	0.77	0.69	0.61
5. Kota Tangerang	2.36	2.28	2.21
6. Kota Cilegon	1.68	1.6	1.53
7. Kota Serang	1.92	1.83	1.77
8. Kota Tangsel	3.36	3.28	3.21
Provinsi Banten	2.14	2.07	2.01

Sumber: SIPD Provinsi Banten Tahun 2018

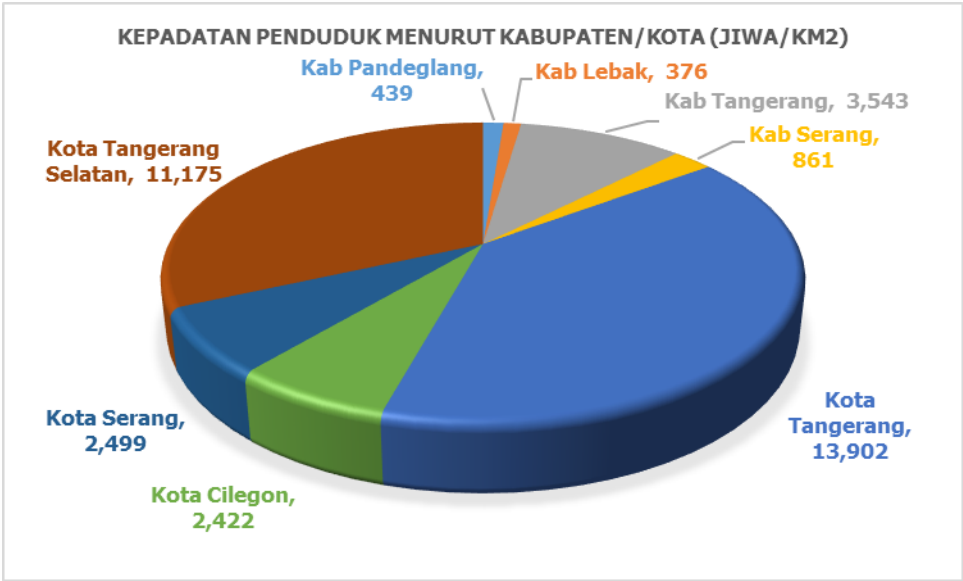


Gambar 2.3

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2017 dihuni oleh sekitar 59,20% dari jumlah penduduk Banten.

Sedangkan 40,80% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 13.902 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 376 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 36 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Sebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :



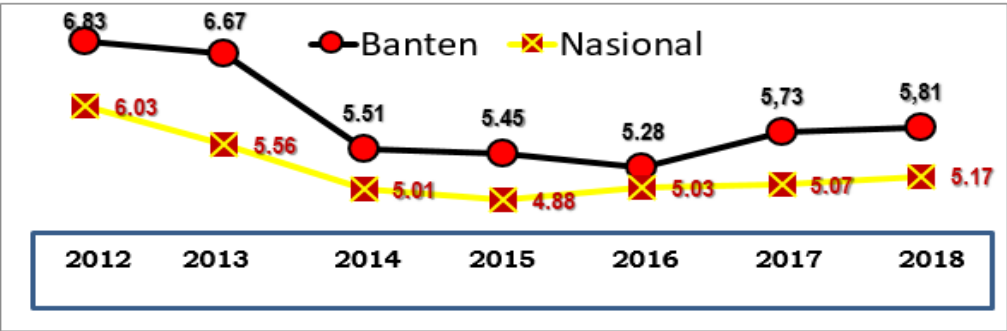
Gambar 2.4
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Km²)
di Provinsi Banten Tahun 2017

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2012-2018 (Tw IV)

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.1
 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018
 (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha (1)	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,18	33,26	35,57	22,11	23,05	23,88
B. Pertambangan dan Penggalian	4,08	4,15	4,27	2,87	2,85	2,87
C. Industri Pengolahan	168,70	179,93	191,86	139,07	144,22	149,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,02	11,98	12,77	4,16	4,18	4,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,40	0,45	0,48	0,37	0,40	0,42
F. Konstruksi	52,40	58,05	65,27	36,31	39,22	42,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	63,08	69,27	76,82	51,49	54,65	58,61
H. Transportasi dan Pergudangan	55,42	61,26	68,13	25,13	27,29	29,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,30	13,48	14,63	9,17	9,92	10,66
J. Informasi dan Komunikasi	18,30	20,48	21,70	21,37	23,17	25,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	15,76	17,06	18,97	11,59	12,04	12,87
L. Real Estate	37,38	42,10	46,87	32,00	34,54	37,26
M,N. Jasa Perusahaan	5,42	6,08	6,67	3,88	4,18	4,46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,56	11,46	12,30	6,81	7,14	7,52
P. Jasa Pendidikan	16,74	18,65	21,13	11,35	12,20	13,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	6,66	7,44	4,54	4,91	5,25
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,15	9,13	10,02	5,61	6,07	6,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	517,90	563,46	614,91	387,84	410,05	433,88

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Tabel 2.2
 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (Persen)

Lapangan Usaha (1)	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	4,28	3,58	6,02	5,90	5,78
B. Pertambangan dan Penggalian	3,43	(0,68)	0,72	0,79	0,74	0,69
C. Industri Pengolahan	3,09	3,70	3,61	32,57	31,93	31,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	(4,14)	0,50	7,20	2,32	2,13	2,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	7,30	4,87	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	6,31	8,03	7,69	10,12	10,30	10,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,85	6,15	7,25	12,18	12,29	12,49
H. Transportasi dan Pergudangan	7,65	8,57	7,35	10,70	10,87	11,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,58	8,28	7,45	2,37	2,39	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	8,04	8,42	7,87	3,53	3,64	3,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	14,31	3,89	6,94	3,04	3,03	3,08
L. Real Estate	7,80	7,92	7,88	7,22	7,47	7,62
M,N. Jasa Perusahaan	7,44	7,91	6,62	1,05	1,08	1,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,11	4,79	5,29	2,04	2,03	2,00
P. Jasa Pendidikan	6,64	7,42	7,43	3,23	3,31	3,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,42	8,15	6,85	1,15	1,18	1,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,53	8,27	7,63	1,57	1,62	1,63
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,28	5,73	5,81	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Perekonomian Banten Tahun 2018 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 614,91 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 48,46 juta. Ekonomi Banten tahun 2018 tumbuh 5,81 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 7,88 persen.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 7,14 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2018 bila dibandingkan triwulan IV-2017 (y-on-y) tumbuh 5,98 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,11 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,88 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2018 meningkat sebesar 0,99 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 5,59 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah yang meningkat sebesar 44,01 persen.

Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Tahun 2018 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,66 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,98 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,39 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,02 persen

2. Inflasi

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3
 IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten
 Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Maret 2019 (2012= 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2018	IHK Februari 2019	IHK Maret 2019	Inflasi Maret 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)	Inflasi "Year on Year" ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U M U M	139,66	143,70	143,81	0,08	0,43	2,97
1. Bahan Makanan	151,79	152,16	151,29	-0,57	-0,74	-0,33
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	154,71	159,28	159,88	0,38	1,26	3,34
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	131,10	136,39	136,47	0,06	1,05	4,10
4. Sandang	115,42	119,84	119,89	0,04	0,45	3,87
5. Kesehatan	137,23	144,19	144,50	0,22	0,27	5,30
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	136,43	142,59	142,44	-0,11	0,10	4,41
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	131,25	134,90	135,68	0,57	0,25	3,37

Ket : *) *Persentase perubahan IHK Bulan Maret 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya*
 **) *Persentase perubahan IHK Bulan Maret 2019 terhadap IHK Bulan Desember 2018*
 ***) *Persentase perubahan IHK Bulan Maret 2019 terhadap IHK Bulan Maret 2018*

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Bulan Maret tahun 2019, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 143,70 pada bulan Februari menjadi 143,81 pada bulan Maret atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,08 persen.

Lima kelompok pengeluaran yang ada mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,57 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,38 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,22 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,06 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,04 persen, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sebesar -0,11 persen dan kelompok bahan makanan mengalami penurunan indeks sebesar -0,57 persen.

Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Maret ini adalah angkutan udara, bawang merah, tahu mentah, bawang putih, air kemasan dan bayam.

Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,43 persen, sedangkan inflasi “Year on Year” (IHK Maret 2019 terhadap Maret 2018) tercatat sebesar 2,97 persen.

3. PDRB Perkapita

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Nilai (Juta Rp)	42,44	45,26	48,46
- Nilai (US \$)	3.189,53	3.383,35	3.403,18

4. Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,367. Angka ini turun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,385.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,362 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,386. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan justru meningkat dari 0,283 pada Maret 2018 menjadi 0,299 pada September 2018.

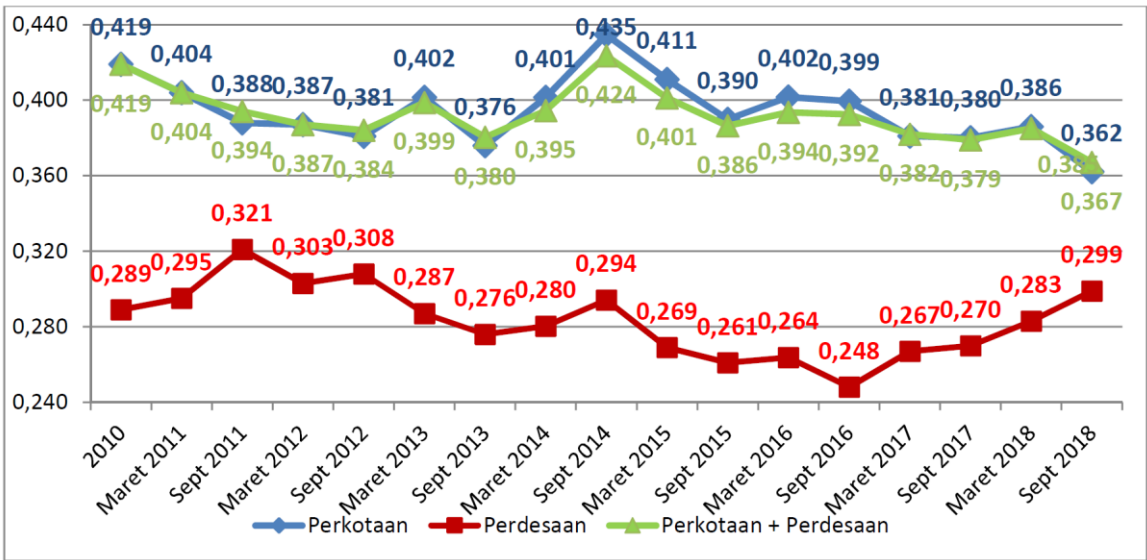
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,362. Angka ini turun sebesar 0,023 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,386. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2018 tercatat sebesar 0,299, angka ini naik sebesar 0,016 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018. Nilai Gini Ratio di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada table dan gambar berikut :

Tabel 2.5
Gini Rasio Provinsi Banten Tahun 2015-2018

Klasifikasi Daerah	2015	2016	2017	2018
Perkotaan	0.39	0.4	0.38	0.36
Perdesaan	0.26	0.25	0.27	0.30
Perkotaan + Perdesaan	0.39	0.39	0.38	0.37

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2019



Gambar 2.6

Perkembangan Gini Ratio Banten, 2010–September 2018

Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,50 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,22 persen dan di daerah perdesaan sebesar 21,75 Persen.

Tabel 2.6
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Banten
September 2017, Maret 2018 dan September 2018 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
September 2017	17,58	37,63	44,79	100
Maret 2018	17,23	37,27	45,50	100
September 2018	18,22	38,32	43,46	100
<u>Perdesaan</u>				
September 2017	23,11	40,58	36,31	100
Maret 2018	21,98	41,23	36,79	100
September 2018	21,75	39,86	38,39	100
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
September 2017	17,95	36,62	45,43	100
Maret 2018	17,54	36,53	45,93	100
September 2018	18,50	37,04	44,45	100

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019

5. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2018 sebesar 5,25 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24 persen. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada September 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2018 sebesar 4,38 persen turun menjadi 4,24 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 7,33 persen naik menjadi 7,67 persen pada September 2018. Selama periode Maret 2018-September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 11,67 ribu orang (dari 393,80 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 382,13 ribu orang pada September 2018), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 19,05 ribu orang (dari 267,55 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 286,60 ribu orang pada September 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,60 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen.

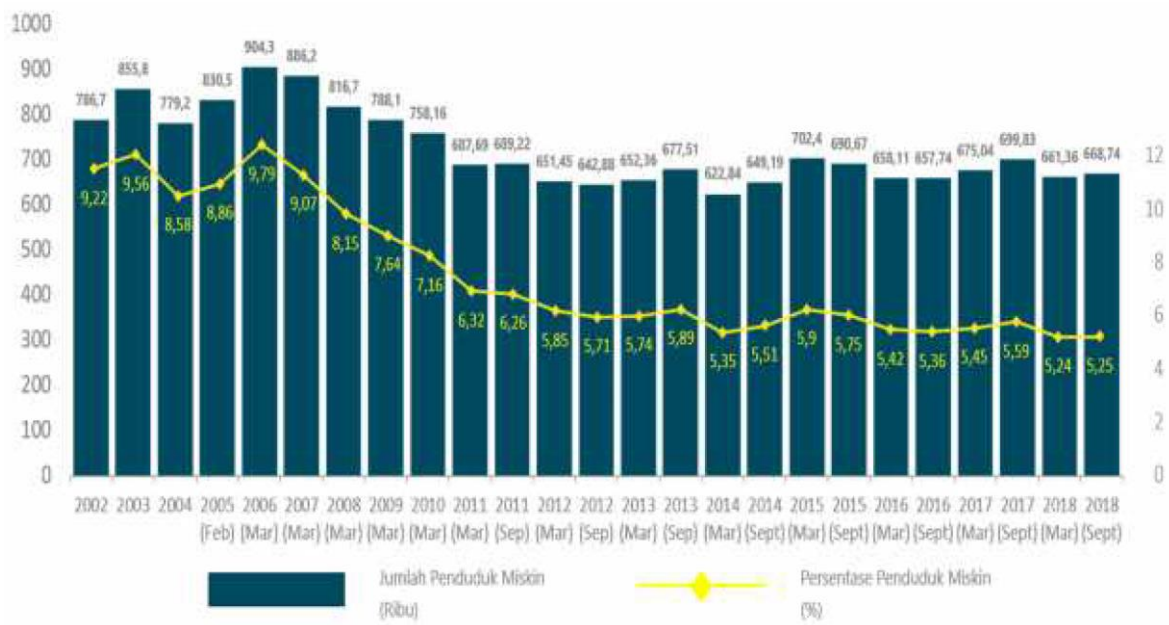
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, roti serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2018-September 2018

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
Perkotaan		
Maret 2018	393,80	4,38
September 2018	382,13	4,24
Perdesaan		
Maret 2018	267,55	7,33
September 2018	286,60	7,67
Perkotaan/Perdesaan		
Maret 2018	661,36	5,24
September 2018	668,74	5,25

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2019

Secara umum, pada periode 2002–2018 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017 dan September 2018. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Gambar berikut menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan September 2018.



Gambar 2.7
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-2018

Tabel 2.8
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah (Ribuan Jiwa)			Presentase		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	124.42	115.9	117.31	10.43	9.67	9.74
Kab Lebak	126.42	111.21	111.08	9.97	8.71	8.64
Kab Tangerang	191.12	182.52	191.62	5.71	5.29	5.39
Kab Serang	74.85	67.92	69.1	5.09	4.58	4.63
Kota Tangerang	102.56	102.88	105.34	5.04	4.94	4.95
Kota Cilegon	16.96	14.9	14.89	4.1	3.57	3.52
Kota Serang	40.19	36.4	36.97	6.28	5.58	5.57
Kota Tangerang Selatan	25.89	26.38	28.73	1.69	1.67	1.76
Provinsi Banten	702.4	658.11	675.04	5.9	5.42	5.45

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2019

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,822 pada Maret 2018 menjadi 0,908 pada September 2018. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,196 menjadi 0,250 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tabel 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Banten Menurut Daerah, Maret 2018- September 2018

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,692	1,143	0,822
September 2018	0,684	1,449	0,908
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,162	0,278	0,196
September 2018	0,157	0,475	0,250

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019

Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan di perkotaan, sebaliknya di perdesaan justru meningkat. Di perkotaan nilai P1 turun dari 0,962 pada Maret 2018 menjadi 0,684 pada September 2018 dan nilai P2 turun dari 0,162 menjadi 0,157 pada periode yang sama. Sementara di perdesaan nilai P1 naik 0,305 poin dan nilai P2 naik 0,197 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perdesaan semakin terpuruk.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret 2018- September 2018 antara lain adalah:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2018 sebesar 5,89 persen, sedikit lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2018 (5,95 persen).
2. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2018 (99,26) lebih rendah dibanding Maret 2018 (101,00). Rata-rata NTP periode Maret 2018-September 2018 sebesar 98,54. NTP diatas 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani lebih baik.

3. Inflasi Pedesaan periode Maret 2018-September 2018 sebesar 2,70% lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode Maret 2018-September 2018 sebesar 1,49%.

6. Fokus Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari IPM.

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar hidup layak.

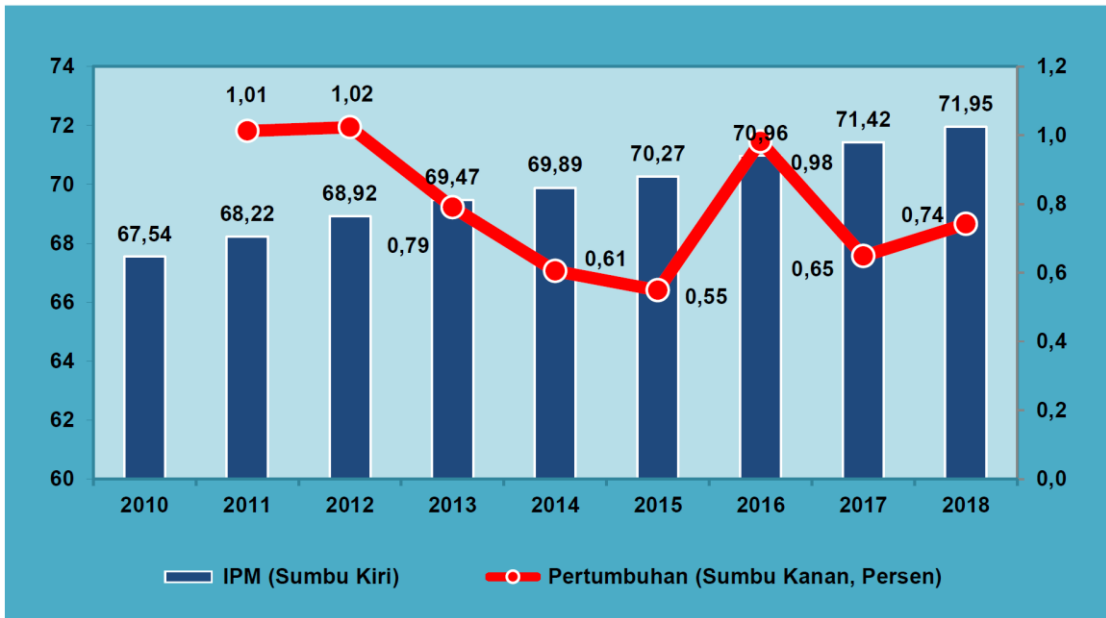
Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut, diperoleh Banten sejak tahun 2015.

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan yang terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PKP, masing-masing 69,64 tahun, 12,85 tahun, 8,62 tahun, dan 12,0 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,17) dan Kabupaten Lebak (63,37). Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2015-2018

KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	62.72	63.4	63.82	64,34
Kab Lebak	62.03	62.78	62.95	63,37
Kab Tangerang	70.05	70.44	70.97	71,59
Kab Serang	64.61	65.12	65.6	65,93
Kota Tangerang	76.08	76.81	77.01	77,92
Kota Cilegon	71.81	72.04	72.29	72,65
Kota Serang	70.51	71.09	71.31	71,68
Kota Tangerang Selatan	79.38	80.11	80.84	81,17
Provinsi Banten	70.27	70.96	71.42	71,95

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019



Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Gambar 2.8
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2018

Secara umum pembangunan manusia Banten selama delapan tahun terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 71,95 pada tahun 2018. Selain itu, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2018 juga mengalami akselerasi atau percepatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Hanya saja, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

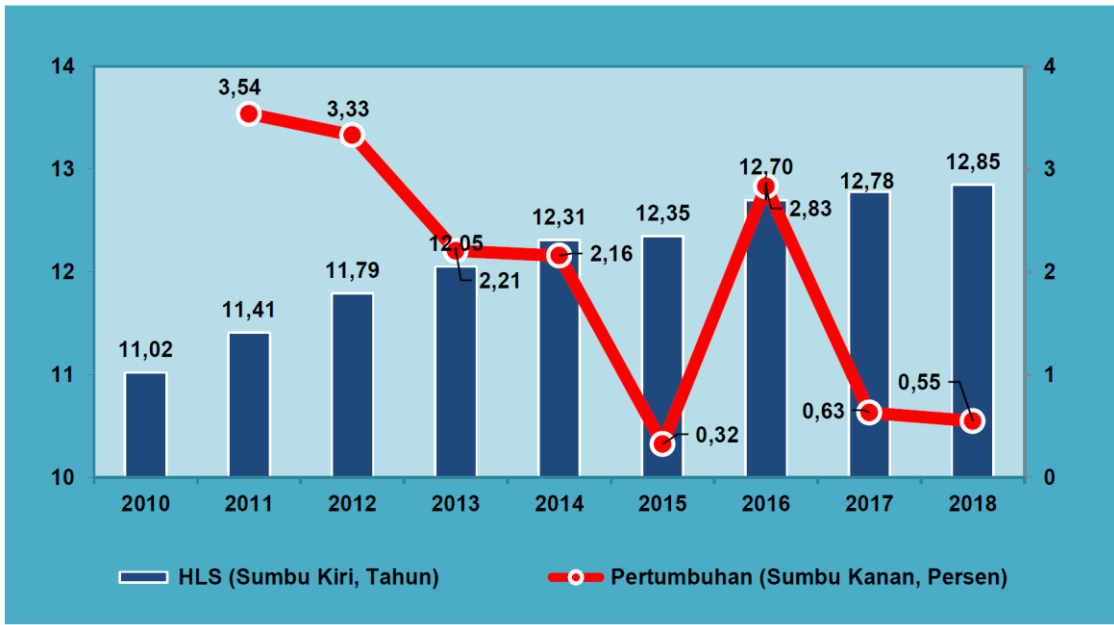
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada:

- 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Bidang Pendidikan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Ada keterkaitan antara kedua indikator ini, yakni peningkatan angka Harapan Lama Sekolah dalam jangka panjang akan menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah.

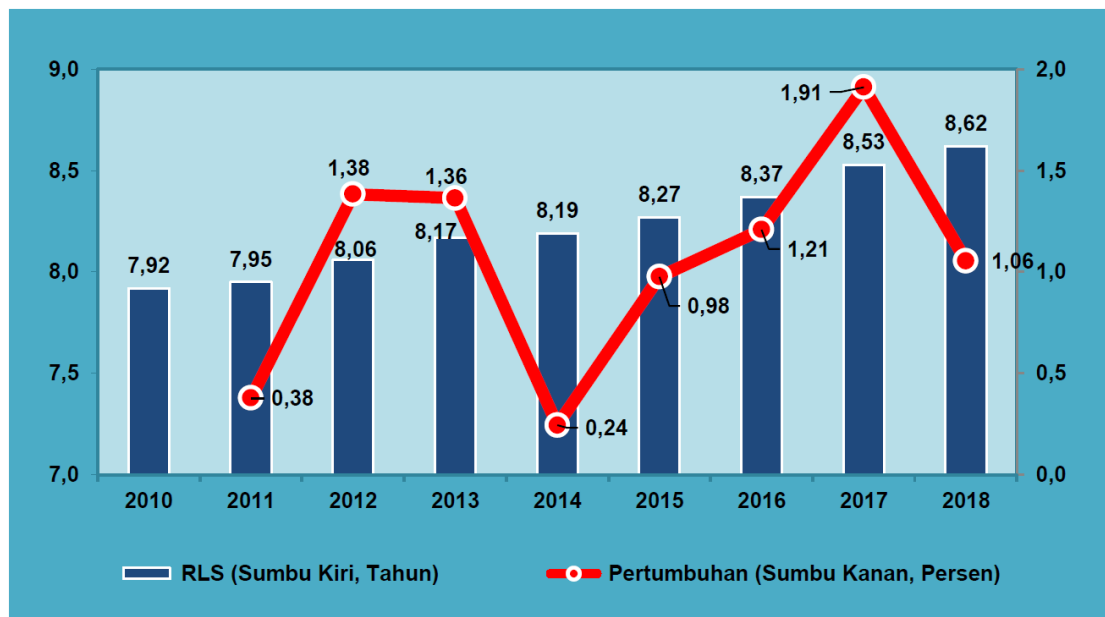


Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Gambar 2.9
Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Banten
Tahun 2010-2018

Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebanyak 1,83 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi yang demikian sekaligus juga menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah.

Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 telah mencapai 12,85 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2018, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.



Gambar 2.10
Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Banten Tahun 2010-2018

Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2018 telah mencapai 8,62 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Hanya saja dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, penduduk Banten usia 7-24 tahun yang masih sekolah sebanyak 68,09 persen. Untuk kelompok umur 7-12 tahun yang masih sekolah sebanyak 99,31 persen, kemudian kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 95,67 persen, kelompok umur 16-18 tahun

sebanyak 67,77 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 21,33 persen.

Pada tahun 2017, di Provinsi Banten terdapat 4.562 unit Sekolah Dasar (SD) dengan 53.354 guru dan 1.195.653 murid. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada tahun 2017 terdapat 1.421 unit SMP dengan 19.995 guru dan 424.406 murid. Sementara itu, untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), di Provinsi Banten terdapat 529 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9.613 guru dan 182.941 murid, serta 668 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 10.900 guru dan 250.361 murid.

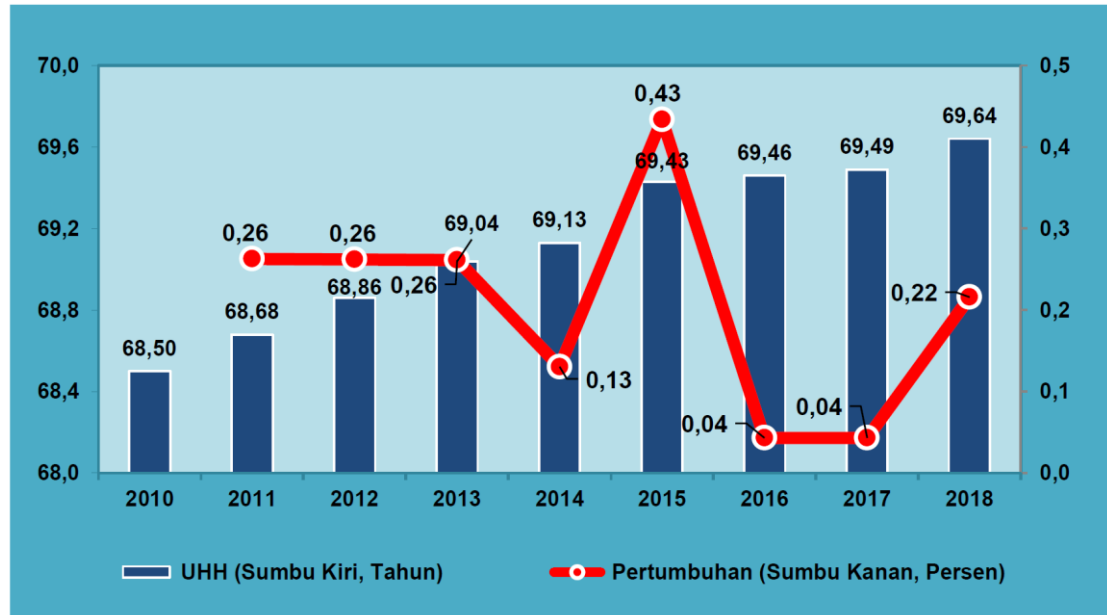
Disamping sekolah umum tersebut, di Provinsi Banten juga terdapat 1.036 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1.005 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), 396 unit Madrasah Aliyah (MA) serta 3.267 pondok pesantren.

b. Bidang Kesehatan

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, umur panjang dan hidup sehat juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Sepanjang periode 2010 hingga 2018, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,14 tahun. Selain itu, pertumbuhan UHH nya dalam setahun terakhir ini mengalami peningkatan, meskipun secara keseluruhan dalam rentang periode 2010-2018 cenderung melambat.

Adapun Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2018 ini, mencapai 69,64 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2018 dapat berharap untuk hidup sampai usia 69 tahun 8 bulan.



Gambar 2.11
Perkembangan Komponen Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
Banten Tahun 2010-2018

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

- 1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan;
- 2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan, dan apoteker;
- 3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2017, fasilitas kesehatan yang tersedia di Provinsi Banten antara lain 106 unit Rumah Sakit, 239 Puskesmas, dan 1.245 Klinik/ Balai Kesehatan. Tenaga kesehatan yang tersedia di Provinsi Banten sebanyak 1.415 tenaga medis, 4.281 tenaga keperawatan, 4.118 tenaga kebidanan, 414 tenaga kefarmasian, dan 1.291 tenaga kesehatan lainnya.

c. Bidang Infrastruktur

Pada tahun 2017, dari 762,03 km jalan di Provinsi Banten, sepanjang 432,13 km dalam kondisi baik (56,71%), kemudian 170,69 km dalam kondisi sedang (22,40%), 75,58 km dalam kondisi rusak (9,92%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (10,97%).

d. Bidang Sosial

Pada Maret 2017 terdapat 675,04 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten (5,45%), sementara pada September 2017 terdapat 699,83 ribu penduduk miskin (5,59%). Persentase penduduk miskin tersebut meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 5,42 persen pada bulan Maret 2016 dan 5,36 persen pada bulan September 2016.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 6,142 juta orang, naik 53.916 orang dibanding Februari 2018. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, tidak disertai dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Ini disebabkan oleh adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja.

Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 6.947 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 7,58 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,676 juta orang, bertambah 60.863 orang dari Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Perdagangan (4,53 persen poin), Konstruksi (1,34 persen poin), dan Jasa Pendidikan (1,00 persen poin) Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian & Pertambangan (2,67 persen poin); Industri Pengolahan (1,52 persen poin); serta Jasa Lainnya (1,24 persen poin).

Sebanyak 2,46 juta orang (43,41 persen) bekerja di kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), pekerja informal turun sebesar 1,34 persen poin.

Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 78,18 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 1,24 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (14,88 persen) dan pekerja setengah penganggur (5,61 persen).

3. Urusan Pilihan

a. Bidang Pertanian

Pada tahun 2017, produksi padi di Provinsi Banten sebesar 2,37 juta ton untuk padi sawah dan 43,75 ribu ton untuk padi ladang.

Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2017 masing-masing adalah 63,52 ribu ton jagung, 2,13 ribu ton kedelai, 5,73 ribu ton kacang tanah, 221 ton kacang hijau, 75,49 ribu ton ubi kayu, dan 20,72 ribu ton ubi jalar.

Pada tahun 2017, komoditi sayuran dan buah-buahan tahunan di Provinsi Banten didominasi oleh pisang, melinjo, dan durian. Produksi pisang tahun 2017 sebesar 250,19 ribu ton, melinjo sebesar 24,80 ribu ton, dan durian sebesar 22,63 ribu ton. Sedangkan komoditi sayuran dan buah-buahan semusim didominasi oleh jamur sebesar 1,39 ribu ton, kacang panjang sebesar 1,31 ribu ton dan ketimun sebesar 1,29 ribu ton.

Tiga komoditi utama tanaman perkebunan di Provinsi Banten pada tahun 2017 yaitu kelapa dengan produksi sebesar 43.046 ton, kelapa sawit sebesar 3.785 ton, dan karet sebesar 6.591 ton.

Populasi sapi (sapi potong dan sapi perah) di Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 56,71 ribu ekor, kerbau sebanyak 101,06 ribu ekor dan kuda 178 ekor. Untuk populasi ternak kecil tercatat domba sebanyak 684,38 ribu ekor, kambing 815,81 ribu ekor, dan babi 5,72 ribu ekor. Sementara itu populasi unggas yaitu ayam pedaging sebanyak 211,70 juta ekor, ayam kampung 11,12 juta ekor, ayam petelur 15,65 juta ekor, itik 1,73 juta ekor, dan itik manila 177,61 ribu ekor.

b. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2017 Provinsi Banten terdapat 9.235 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2017 sebesar 107,36 ribu ton, dimana 106,54 ribu ton atau 99,24 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut.

c. Kehutanan

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2017 berupa kayu bulat sebanyak 17,56 ribu m³ yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba.

Produksi kayu jati pada tahun 2017 sebesar 11,69 ribu m³, dengan nilai produksi 27,89 miliar rupiah, sedangkan produksi kayu rimba sebesar 5,86 ribu m³ dengan nilai 1,95 miliar rupiah

4. Urusan Pelayanan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, dan 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun 2017 sebanyak 10.396 Orang, jumlah laki-laki sebanyak 5.728 orang dan perempuan sebanyak 4.668 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melayani masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut

Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi. Rata-rata konsumsi kalori di Provinsi Banten tahun 2017 adalah sebanyak 2.249,33 kilo kalori per kapita per hari, naik 5,35 persen dari tahun 2016 yang sebanyak 2.135,13 kilo kalori per kapita per hari.

Tabel 2.11
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari
Menurut Kelompok Makanan (kkal) Tahun 2015-2017

Kelompok Makanan	2015	2016	2017
Padi-padian	871,6	915,06	861,81
Umbi-umbian	21,85	26,64	37,81
Ikan	42,89	43,76	50,83
Daging	70,2	70,60	87,87
Telur dan susu	70,45	69,16	72,63
Sayuran	25,57	28,23	33,47
Kacang-kacangan	53,75	61,34	60,35
Buah-buahan	39,17	35,02	47,64
Minyak dan lemak	252,8	267,85	262,06
Bahan minuman	81,13	85,20	78,76
Bumbu-bumbuan	8,42	11,38	14,56
Konsumsi lainnya	69,45	68,18	75,78
Makanan dan minuman jadi	460,12	452,69	565,76
Jumlah	2.067,4	2.135,13	2.249,33

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018 (diolah)

2. Nilai Tukar Petani

NTP Banten Maret 2019 sebesar 100,14 atau turun 0,50 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan.

Pada Maret 2019 terjadi inflasi perdesaan di Provinsi Banten sebesar 0,09 persen yang terjadi pada kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan, Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, Kesehatan dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi sedangkan untuk kelompok Perumahan dan Sandang terjadi deflasi.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten Maret 2019 sebesar 105,72 atau turun 0,50 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Maret dibandingkan keadaan Februari untuk Gabah Kering Giling (GKG) mengalami penurunan 1,65 persen, Gabah Kering Panen (GKP) turun sebesar 12,21 persen. Rata-rata harga gabah bulan Maret 2019 di tingkat Petani untuk kualitas GKG Rp. 5.535, GKP Rp. 4.477,- per kg,- dan kualitas rendah Rp. 3.993,- per kg. Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp. 3.900,- per kg untuk kualitas Rendah dengan varietas ciherang dan harga tertinggi di tingkat petani sebesar Rp 5.650,- per kg untuk kualitas GKG dengan varietas Ciherang. Upah nominal buruh tani pada Maret 2019 dibanding upah buruh tani Februari 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen atau naik dari Rp. 63.014,- per hari menjadi Rp. 63.080,- per hari. Secara riil*) mengalami kenaikan juga sebesar 0,02 persen yakni naik dari Rp. 44.698,- per hari menjadi Rp. 44.706,- per hari.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 4 Kabupaten di Provinsi Banten pada Maret 2019, NTP secara umum mengalami penurunan sebesar 0,50 persen dibandingkan NTP Februari 2019 yaitu dari 100,64 menjadi 100,14. Penurunan NTP pada Maret 2019 dikarenakan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,43 persen sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen.

Tabel 2.12
 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Bulan Maret 2019 (2012=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	Februari 2019	Maret 2019	
(1)	(2)	3)	(4)
a. Indeks yang diterima (I _t)	138,82	138,22	-0,43
b. Indeks yang dibayar (I _b)	137,93	138,03	0,07
c. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	140,98	141,10	0,09
d. Indeks BPPBM	130,65	130,74	0,07
e. Nilai Tukar Petani (NTP)	100,64	100,14	-0,50

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019

Penurunan NTP Maret 2019 disebabkan oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,14 persen, Subsektor Perikanan sebesar 0,15 persen, Subsektor Peternakan 0,07 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,01 persen. Walaupun Subsektor Tanaman Hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen.

3. Rasio ketergantungan

Sebanyak 27,51 persen penduduk Banten berusia muda (0-14 tahun), 69,57 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 2,92 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Banten sebesar 46,14

Tabel 2.13
Tingkat ketergantungan / rasio ketergantungan
Tahun 2015-2016

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- -tungan Penduduk
Kabupaten						
1. Pandeglang	745.153	440.758	58,44	759.094	441.418	58,15
2. Lebak	817.685	452.127	55,29	825.341	454.071	55,02
3. Tangerang	2.317.669	1.052.925	45,43	2.393.975	1.083.520	45,26
4. Serang	972.969	501.332	51,53	981.102	503.400	51,31
Kota						
5. Tangerang	1.479.769	567.336	38,34	1.515.630	578.076	38,14
6. Cilegon	284.709	127.397	44,75	289.755	128.950	44,50
7. Serang	428.724	214.481	50,03	437.240	217.764	49,80
8. Tangerang Selatan	1.109.911	433.298	39,04	1.148.071	445.741	38,83
Provinsi Banten	8.165.589	3.789.654	46,41	8.350.208	3.852.940	46,14
Indonesia	171.874.200	83.587.500	48,63	174.375.100	84.329.900	48,36

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2019